

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam 4 tahun terakhir, berada pada angka yang cukup stagnan. Secara berturut dari tahun 2014 hingga 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01%, 4,88%, 5,03% dan 5,07%. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,17%. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menjadi titik tertinggi sejak tahun 2014.

Pada tahun yang sama, Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia bagian timur, memiliki persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 7,33%. Angka ini terbilang sangat baik jika dibandingkan dari tahun 2017 dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar 4,64%. Tidak hanya itu, provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Selatan memiliki PDRB sebesar 7,92% dan 7,06%. Angka ini jauh lebih unggul dibandingkan PDRB ibukota DKI Jakarta yang sebesar 6,17%. Namun, dengan tingginya PDRB yang dimiliki oleh tiap provinsi, seharusnya menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan ekonomi, belum bisa menurunkan jumlah penduduk miskin yang berada disana. Kemiskinan ialah salah satu masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, menurut Kuncoro (1997) kemiskinan ialah ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan dasar dalam hidup ialah terdiri dari sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.



Gambar 1.1

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Bagian Timur 2018

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Secara keseluruhan, persentase jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia bagian timur pada tahun 2018 masih cukup tinggi dengan terdapatnya Provinsi Papua di urutan pertama dengan angka 27,43% diikuti Papua Barat sebesar 22,66% Maluku sebesar 17,85% Gorontalo 15,83% dan Sulawesi Tengah 13,69%. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa 5 dari 10 provinsi di Indonesia bagian timur memiliki persentase penduduk miskin diatas 12% yang artinya masih sangat tinggi. Masalah kemiskinan ini, terjadi akibat dari berbagai macam faktor, seperti keterbatasan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan, hingga rendahnya kesempatan kerja, sehingga mengakibatkan kebutuhan hidup tidak tercukupi

Menurut Nugroho dalam Jacobus, Kindangen, & Walewangko (2018), menyatakan kemiskinan sebagai kemampuan pendapatan yang relatif rendah, akan menyebabkan daya beli seseorang dalam memenuhi kebutuhan

menjadi rendah pula. Hal ini sangat berkenaan dengan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan gizi, dan kesehatan. Dalam masalah ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan yang mengakibatkan kemiskinan, diantaranya ialah ketersediaan gizi yang relatif rendah, kesehatan yang kurang terjamin, pemukiman kurang layak huni dan rendahnya taraf pendidikan.

Pada tahun 2018, diantara 10 Provinsi yang ada di Indonesia bagian timur, hanya 2 provinsi yang rata-rata lama sekolahnya berada setaraf dengan Sekolah menengah Atas.



Gambar 1.2

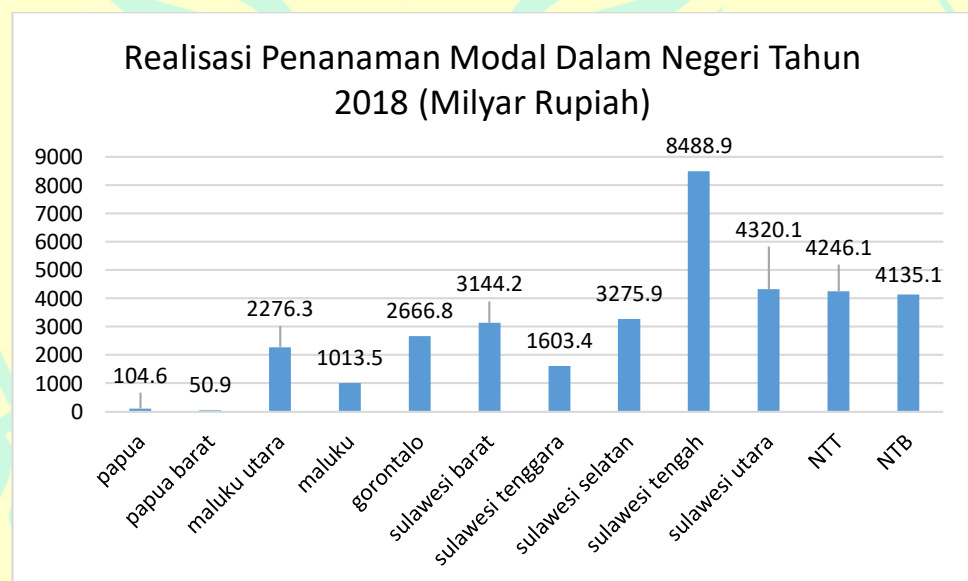
Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Timur 2018

Sumber: bps.go.id

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 8 provinsi di Indonesia timur merupakan satu dari berbagai faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan pada masing masing provinsi. Berdasarkan data yang dari BPS. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua pada tahun 2018 hanya berada pada angka 6.52, selanjutnya Provinsi Papua Barat hanya 7.27 dan yang paling tinggi ialah Provinsi Maluku dengan angka 9.58, meskipun

Provinsi Maluku mencatat angka tertinggi, rata-rata lama sekolah yang dimiliki ialah setara dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Menurut Berlian VA (2011) rendahnya tingkat pendidikan selaras dengan rendahnya kapasitas fiskal, jarak sekolah yang cukup jauh, serta rendahnya motivasi penduduk dalam hal pendidikan, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk.

Menurut Anderson, Renzio, & Levy (2006), menyatakan bahwa terdapat hubungan kuat dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan investasi publik, setidaknya dalam meningkatkan investasi publik, kemiskinan mulai dari tingkat negara sampai ke daerah dapat dikurangi atau diminimalisir.



Gambar 1.3

**Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Bagian Timur
2018**

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi penanaman modal dalam negeri di beberapa provinsi masih sangatlah rendah, tercatat bahwa provinsi yang paling rendah ialah Papua barat dengan jumlah

penanaman modal dalam negeri hanya 50 milyar per tahun, diikuti oleh provinsi Papua dengan 104 milyar per tahun, selanjutnya provinsi Maluku sebesar 1013 milyar per tahun. Hal ini selaras dengan data persentase penduduk miskin pada 3 provinsi tersebut ialah cukup tinggi dengan data masih diatas 17% penduduk miskin pada tahun 2018. Menurut Purwadi, Hafizrianda, & Purba Riani (2018) rendahnya investasi berkaitan dengan pondasi ekonomi yang masih menitikberatkan pada satu sektor yang cukup mendominasi yakni pertambangan, serta terjadinya ketimpangan antar wilayah sehingga akan menentukan dalam perkembangan investasi daerah.

Dalam Penelitian Yoga Permana & Arianti (2012), menunjukkan hasil bahwa PDRB, pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Selanjutnya dalam penelitian Pateda, Masinambouw, & Rotinsulu (2016), menyatakan bahwa investasi memberi pengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga harusnya dengan meningkatnya investasi maka akan menurunkan kemiskinan.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan investasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan. Penelitian ini sebagai pembaharuan dari penelitian sebelumnya, sebab data yang digunakan dalam penelitian ini lebih baru yakni tahun 2016-2018 dan wilayah yang dijadikan studi kasus ialah Indonesia bagian timur, dimana provinsi yang menjadi bahan penelitian ialah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga, peneliti tertarik untuk membahas masalah Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia bagian timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur.
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur.
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan investasi secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia Bagian Timur.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin didapatkan setelah dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia timur.
2. Mengetahui pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Indonesia timur.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan investasi secara simultan terhadap Kemiskinan di Indonesia timur.

D. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa kebaruan yakni:

1. Lokasi penelitian yang digunakan ialah Indonesia Bagian Timur dengan mengambil data dari 12 Provinsi.
2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini ialah pembaharuan penelitian sebelumnya, yakni rentang tahun 2016-2018.